



PEMERINTAH
KABUPATEN
BONE



RENCANA KERJA TAHUN 2023

KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Lampiran :

Perbub Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

RENCANA KERJA KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kahu Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Kahu, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat dijadikan motifasi dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bagi seluruh Aparat Kecamatan demi mencapai visi dan misi. Keberhasilan Renja ini tidak lepas dari kerja sama, integritas moral dan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat.

Palattae, 25 Juli 2022

CAMAT KAHU


ANDITAH MAY MUSRYA, S.STP
Rangkat : Pembina TK.I
NIP. 19810718 199912 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN			
1.1	LATAR BELAKANG	1	
1.2	LANDASAN HUKUM	1	
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	3	
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	4	
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU			
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7	
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13	
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS & FUNGSI PD	16	
2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	16	
2.5	PENELAAH USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT.....	23	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	24	
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH	24	
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			28
BAB V PENUTUP.....			33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

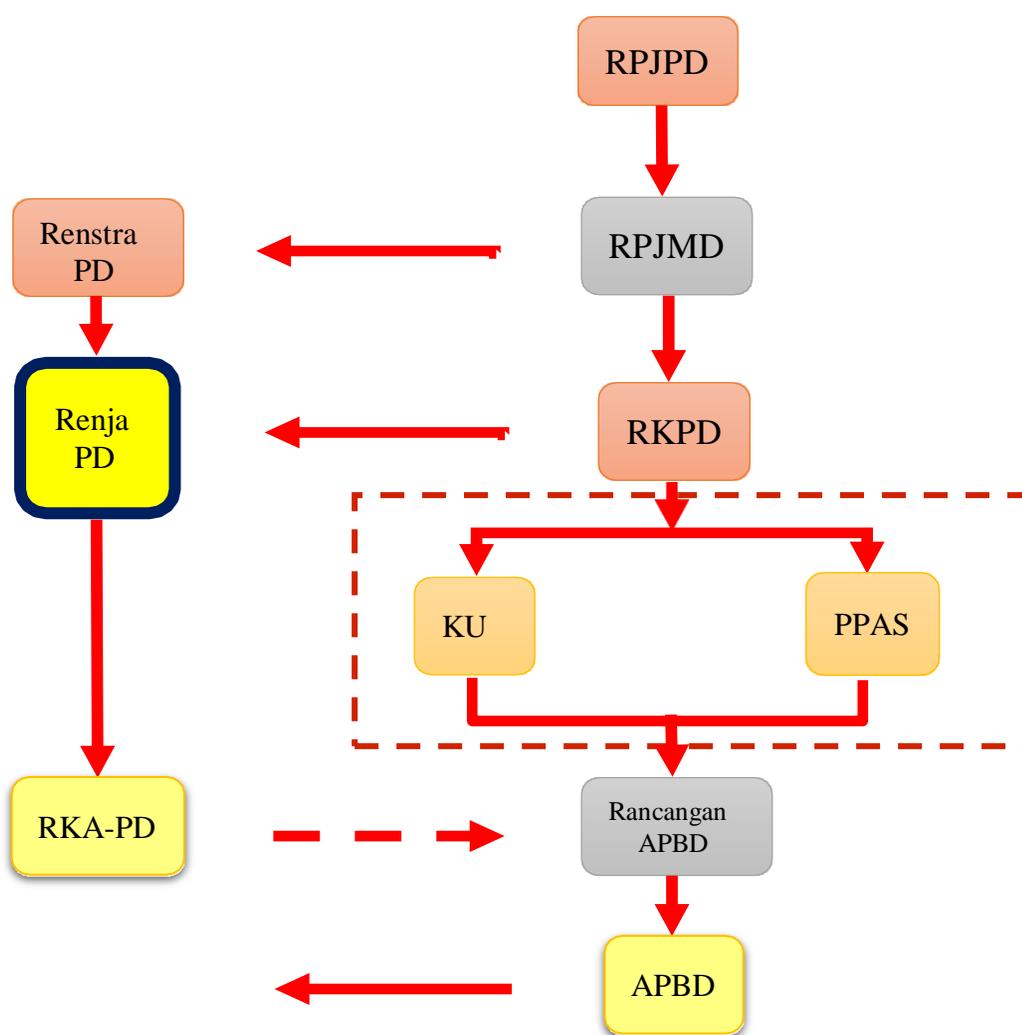
Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

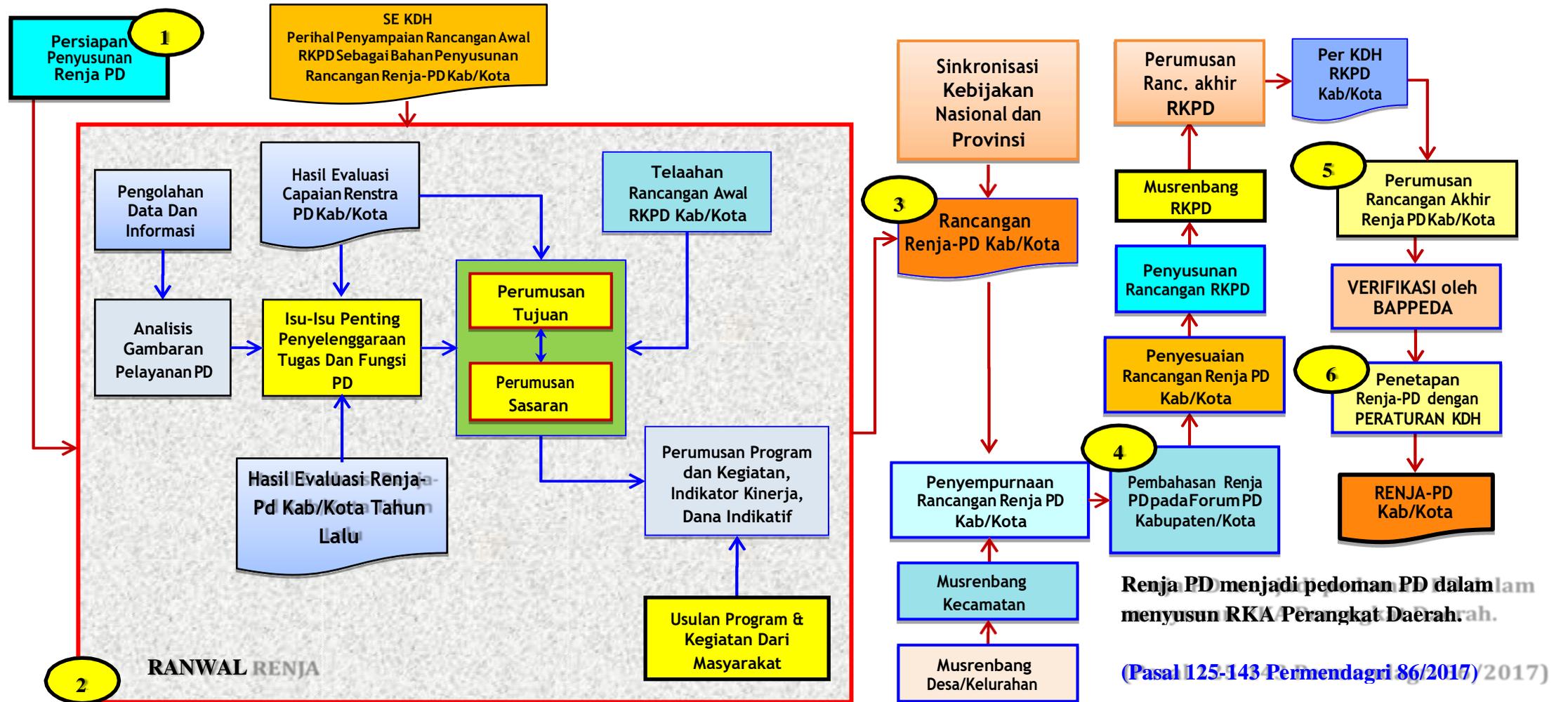


Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja- PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait. Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja 1 (satu) tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kahu Tahun Kerja 2023 didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor)
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
 39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
 40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
 41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
 42. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan pada Kantor Camat Kahu sebagai Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

❖ Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Kahu Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

❖ Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kahu Tahun 2023 adalah :

- a. Memberikan Arah dan Pedoman bagi seluruh aparaturnya Kecamatan Kahu dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas – prioritas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2023 dapat tercapai.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Kahu Tahun 2023.
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2023.
- d. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Kahu dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.
- f. Mewujudkan Perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- g. Mensinergikan anatara kebijakan dan program yang ada dalam Renja dengan Renja yang disusun setiap tahun.
- h. Renja merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
- i. Sebagai bahan evaluasi Perencanaan tugas – tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan : memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu : menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : memuat rumusan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kahu : Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Kecamatan Kahu secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup : Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Kecamatan Kahu pada Tahun perencanaan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

2.1 **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN**

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (Masyarakat, Pemerintah Maupun Dunia Usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Kahu khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Di sisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2021 dan APBD Kabupaten Bone dan dituangkan kedalam tabel T-C. 29 berikut ini :

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN KAHU**

PERMENDAGRI 90

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Kecamatan Tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					URUSAN KEWILAYAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	100	97,72	97,72		100	100
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	98,10	100		100	100
7	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8	2	2	2	100%	2	2	50%

7	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	7	1	1	1	100%	1	1	43%
7	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	6	1	1	1	100%	1	1	50%
7	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	1	50%
7	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	1	1	1	100%	1	1	50%
7	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	3	1	1	1	100%	1	1	50%
7	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	3	1	1	1	100%	1	1	50%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	97,90	100			
7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	3	1	1	1	100%	1	1	100%
7	1	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	3	1	1	1	100%	1	1	90%
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	100				

7	1	1	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	2	1	1	1	100%	1	1	65%
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100				
7	1	1	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	25	26	27	100%	26	27	100%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			89,60	100				
7	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	1	1	100%	1	1	12%
7	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	4	4	100%	4	12	12%
7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)	100	4	4	4	100%	4	12	12%
7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	686	90	90	90	100%	120	300	23%
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100				
7	1	1	2.06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (mebel)	12	3	3	3	100%	3	9	60%

7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)	25	5	5	5	100%	3	13	26%	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	120	36	36	36	100%	36	108	60%	
7	1	1	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selamasetahun (orang)	360	144	172	144	84%	12	300	42%	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86,90	100					
7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120	5	5	5	100%	5	13	52%	
7	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	4	4	4	100%	4	12	52%	
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	60	12	12	12	100%	2	26	41%	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100			
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100			

7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	5	1	1	1	100%	1	1	70%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7	1	3	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	5	1	1	1	100%	1	1	60%
7	1	3	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan (dokumen)	5	1	1	1	100%	1	1	25%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100	100	100	100	100	100		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	
7	1	4	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	180	96	36	36	100%	36	168	93%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100	100	100	100	100	100		
7	1	6	2.02		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100		

7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	70	19	19	19	100%	19	42	60%
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB) (laporan)	70	19	19	19	100%	19	42	60%

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indicator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indicator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indicator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel 1. di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 32 indikator sub kegiatan. Pada 4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Kahu Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2022 sebesar 11,22%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 70%;
- 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 55- 70%;
- 21 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 55%;
- 9 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 12 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 11 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 4 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2022, baru mencapai 55,76% secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian

kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2022. Dari 4 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2022 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
- b. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
- c. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Kahu Kab. Bone), khususnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
 - Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “money follow program” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kahu.
 - Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.
 - Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KAHU

Indikator kinerja pelayanan administrasi yang diselenggarakan pada Kantor Camat Kahu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatnya Kualitas dan Wawasan Aparatur
4. Peningkatan Serta Pemutakhiran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Kualitas dan Pemutakhiran Data di Desa/Kelurahan.
6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur di Desa/Kelurahan.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - ❖ Struktur organisasi Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
 - ❖ Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
 - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati

2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :
- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - ❖ Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
 - ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat computer.
 - ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
 - ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Kahu terutama pada jajaran Kasubag yang masih banyak kosong.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kahu yang dijabarkan kedalam tabel T-C. 30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		CatatanAnalisis
				Tahun2020/K	Tahun2021/K	Tahun2022/K	Tahun2023/K	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP			B	B	B	B	B	BB	B	A	
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan			95	96	99	100	97	98,7	99	100	

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Secara umum isu – isu penting / strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku jabatan fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Kahu.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Kahu sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Kahu harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemabangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 yang tercermin pada pelaksanaan program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - ❖ Struktur organisasi Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 - ❖ Situasi Kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - ❖ Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga

- memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
- ❖ Sarana dan prasarana kerja di kantor Camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - ❖ Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi perangkat daerah terkait.
 - ❖ Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan Bupati
2. Adapun kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja adalah :
- ❖ Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - ❖ Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah.
 - ❖ Masih adanya Aparatur Sipil Negara yang belum bisa mengoperasikan perangkat computer.
 - ❖ Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - ❖ Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
 - ❖ Kurangnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Kahu terutama pada jajaran Kasubag yang masih banyak kosong.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kahu untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus ampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *goodgovernance*.

Kecamatan Kahu merupakan salah satu OPD yang berperan strategis

dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone. Pembangunan Kabupaten Bone dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi social ekonomi politik di Kecamatan Kahu akan menjadi hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Bone.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Kahu membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Untuk melihat Kecamatan Kahu secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, berikut telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2023. Semuanya itu dituangkan kedalam tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31.
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Kahu

PERMENDAGRI 90

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				13.088.287.738					15.542.684.187	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	12.847.148.908	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah</i>	100 %	15.170.524.187	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					47.428.540	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					89.210.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	3	14.863.540	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	17.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1	4.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	5.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Laporan)		4.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kahu	umlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	6.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Laporan)		7,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Laporan)	1	3.235.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Laporan)		4.500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.450,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		5.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1	10.500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kahu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		44,7100,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.422.049.766	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.582.214.187
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kahu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159	12.420.249.766	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kahu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	159	14,166,714,185	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	11,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	15,500,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.400.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.240.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	8.400.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	9.240.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.920.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23	7.920.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26	12.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.931.710	Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.400.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kahu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	24	40.026.860	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	48.559.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kahu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (paket)	24	51.884.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	61.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kahu	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)	24	13.480.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24	19.800.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kahu	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (kali)	36	2.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ajangale	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	350	18.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	350	37.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					51.273.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					63.000.000
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	8.776.800	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kahu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	20.700.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	42.497.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	43.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.182.792	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	18.881.192	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	21.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	55.315.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ajangale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	48.032.160	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.962.300	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					118.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	55.625.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	62.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	2.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	4.517.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	50.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kahu	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100 %	33.838.830	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kahu	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		35.000.000	
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					33.838.830	Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					35.000.000

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	33.838.830	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	35.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kahu	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	136.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		260.000.000	
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					15.000.000	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>					15.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	15.000.000	
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>					121.200.000	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Kahu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	87.230.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Kahu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	176,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Kahu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	33.970.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Kahu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	69,360,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kahu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	100%	27.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kahu	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan		27.000.000	
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					27.000.000	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>					27.000.000

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	27.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36	27.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kahu	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	100%	44.100.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kahu	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa			
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					44.100.000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	23.400.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kahu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	17.900.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	20.700.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kahu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	32.260.000	

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Kecamatan Kahu dalam Rancangan Awal RKPd Kab. Bone Tahun 2023 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kahu.

Pada table diatas diuraikan secara rinci mengenai Rancangan awal anggaran Kecamatan Kahu pada RKPD Tahun 2022 dan analisis kebutuhan tahun 2023.pada prinsipnya alokasi yang diberikan pada RKPD Tahun 2023 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera di dalam Perubahan Renstra Kecamatan Kahu dengan Pagu rancangan RKPD sebesar Rp.15.542.684.187 sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi **Rp. 13.088.287.738** Pada prinsipnya acuan pagu Tahun 2023 ini sudah sesuai dengan sasaran dan target capaian yang ditetapkan oleh BKAD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hali ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Kahu didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

3.1 **TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar penerapan pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di embang oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan Good Governace and akuntabilitas publik. Sesuai dengan tema Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2021 **“Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing “**.

Peran Kecamatan Kahu sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan – kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 **TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KECAMATAN**

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan

pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Kahu Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

“Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Social Masyarakat ”

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahu Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2022, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kahu Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kahu Kab. Bone untuk Tahun 2023.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kahu Kab. Bone Tahun 2023, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu Dengan

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Kahu Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2024)	TARGET SASARAN TAHUN 2023	PROGRAM & KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	BB (>70-80)	BB (>70-80)	
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	98%	100%	<p>➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p><i>Terdiri dari 23 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p> <p>➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>

					<p>➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan <p><i>Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p> <p>➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p> <p>➤ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <p><i>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>
--	--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 & Renja 2023

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 32 indikator sub kegiatan. Pada 4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Kahu Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pada kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan.
3. Pada kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.
4. Pada Kegiatan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Kahu dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indicator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan. Pada Renja 2023 hanya terdapat 3 indikator program, 11 indikator kegiatan, dan 28 indikator sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Rancangan Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Kahu dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Rancangan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kahu merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kahu.

Rumusan Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN KAHU**

lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7			UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01		KECAMATAN									
7	01	01			13,088,287,738				15,542,684,187			
7	01	01			12,847,148,908				15,170,524,187			
7	01	01	2.01		47,428,540				89,210,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	4 Dokumen	14,863,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	17,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	7,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Laporan	4,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	44,710,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,422,049,766		100 Persen	14,582,214,187
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	159 Orang/bulan	12,410,249,766	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	14,566,714,187
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15,500,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8,400,000			9,500,000

7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Dokumen	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	9,500,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7,920,000			12,000,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	23 Paket	7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	12,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				126,931,710			169,400,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	24 Paket	40,026,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	48,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	24 Paket	51,884,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	61,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	24 Paket	13,480,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	19,800,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	24 Dokumen	2,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	350 Laporan	18,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	37,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				51,273,800			63,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	4 Unit	8,776,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	20,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	3 Unit	42,497,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	43,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,182,792			126,700,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	36 Laporan	18,881,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	21,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	24 Laporan	101,301,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	105,700,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62,962,300			118,500,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	4 Unit	55,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	62,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	3 Unit	2,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	3 Unit	4,617,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	50,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33,838,830			35,000,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				33,838,830			35,000,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Laporan	33,838,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	35,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				136,200,000			260,000,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15,000,000			15,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	15,000,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				121,200,000			245,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	1 Unit	87,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	176,638,600

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	33,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	68,361,400
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				27,000,000				27,000,000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				27,000,000				27,000,000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	12 Laporan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	27,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				44,100,000				50,160,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				44,100,000				50,160,000
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	19 Laporan	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	17,900,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Bone, Kahu, Semua Kelurahan	19 Laporan	20,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	32,260,000

BAB V PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Kahu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kahu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Selain dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Kaidas – kaidas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Kahu dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Kahu pada Tahun 2023 mendatang akan menetapkan Program dan Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Kahu Tahun 2023 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kahu Tahun 2023 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Kahu tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Palattae, 25 Juli 2022


CAMAT KAHU
ANDI TAHMAY MUSRYA, S.STP
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19810718 19912 1 002

CASCADING KECAMATAN KAHU TAHUN 2022

VISI

MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

TUJUAN KECAMATAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR

Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip

PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

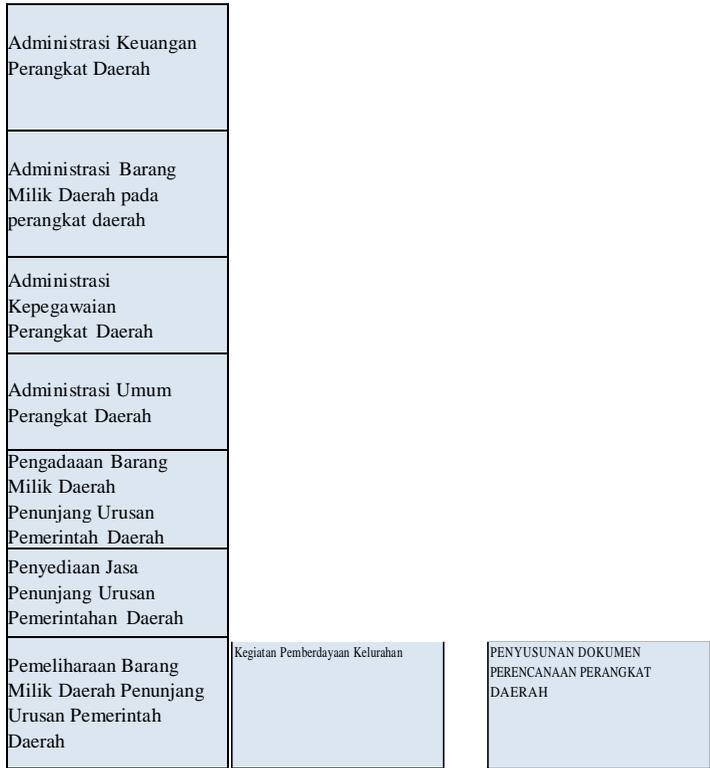
Perencanaan
Penganggaran
dan evaluasi
kinerja

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

**PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,
DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT
DAERAH**



PENANGGUNG JAWAB



Seksi

Seksi
Perekonomian
PAD dan Kesra

Sub.Bagian
Programdan

Sub.Bagian
Umumdan
Kepegawaian



CAMAT KAHU

ANDI RAHMAT MUSRYA, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

Nip 19810718199912 1 00

